

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Komite Audit, Kantor Akuntan Publik serta *Financial Distress* terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018-2023. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Corporate sosial responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness*. *Corporate Social Responsibility* dianggap sebagai suatu cara untuk mengefisienkan beban pajak serta menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan dan kesuksesan suatu perusahaan, karena *Corporate Social Responsibility* dapat membangun kepercayaan para *stakeholder* dan masyarakat..
2. Komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap *Tax Aggressiveness*. Kondisi ini dikarenakan peran komite audit hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris dan tidak memiliki otorisasi eksekusi, keputusan untuk melakukan tindakan *tax aggressiveness* atau tidak berada pada manajemen.
3. Kantor akuntan publik berpengaruh tidak signifikan terhadap *Tax Aggressiveness*. Kondisi ini dikarenakan auditor yang melakukan audit menjalankan penugasan audit sesuai dengan standar audit yang telah ditentukan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik di Indonesia, sebagai auditor mereka untuk menunjukkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan.
4. *Financial distress* berpengaruh tidak signifikan terhadap *Tax Aggressiveness* dengan signifikan sebesar $0,620 > 0,05$. Pada saat kondisi keuangan yang memburuk perusahaan memilih untuk memangkas pengeluarannya seperti menggunakan dana dari luar untuk

mengurangi beban pajaknya maupun menggunakan *transfer pricing* untuk perusahaan multinasional yang terafiliasi.

5. *Corporate social responsibility* berpengaruh tidak signifikan terhadap *financial distress*. Kondisi ini dikarenakan ketika perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan, tetap saja melakukan *Corporate social responsibility* guna menjaga serta membantu membangun hubungan baik antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Perusahaan akan berupaya untuk melakukan perbaikan atas dampak yang merupakan bagian bisnisnya, sehingga pada akhirnya memudahkan perusahaan untuk diterima oleh masyarakat.
6. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Kondisi ini mencerminkan keberadaan komite audit tidak mampu dalam menghindari kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Hal ini terjadi mengingat masih lemahnya praktik *corporate governance* di Indonesia.
7. Kantor akuntan publik berpengaruh tidak signifikan terhadap *financial distress*. Kantor akuntan publik yang besar biasanya memiliki reputasi tinggi akan memberikan informasi atau pendeteksian akan kondisi kesulitan keuangan ke pihak manajemen untuk diperbaiki. Perusahaan harus mengatasi sendiri kesulitan keuangan yang menyimpannya guna memulihkan keadaan keuangan. Perusahaan harus mengatasi sendiri kesulitan keuangan yang menyimpannya guna memulihkan keadaan keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan hendaknya lebih lengkap dalam mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan *Corporate Social Responsibility* dalam laporan tahunannya meliputi; lingkungan, energi, tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, produk, keterlibatan

masyarakat dan umum, karena pengungkapan *Corporate Social Responsibility* efektif digunakan sebagai alat *monitoring* untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

2. Pemerintah diharapkan mampu merumuskan suatu kebijakan untuk menjadikan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai sebuah insitisi diberi wewenang dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, agar pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat ditingkatkan lagi.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax aggressiveness* seperti kepemilikan institusional, kualitas audit, pertumbuhan penjualan, kinerja perusahaan, kompensasi rugi fiskal atau yang lainnya.
4. Melakukan penelitian pada sektor-sektor perusahaan lain karena pada dasarnya, kecurangan tidak hanya terjadi pada perusahaan yang tergabung dalam sektor perusahaan manufaktur saja.

5.3 Keterbatasan dan Implikasi

5.3.1. Keterbatasan

Penelitian yang dilakukan kali ini memiliki beberapa keterbatasan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya agar memperoleh hasil yang jauh lebih baik. Adapun keterbatasan pada penelitian ini diantaranya:

1. Banyak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tidak menyajikan informasi dalam laporan keuangan.
2. Beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tidak mengungkapkan indikator *Corporate Social Responsibility*.
3. Tidak banyak jurnal rujukan yang tersedia sesuai dengan judul yang diangkat.

5.3.2. Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini terdiri dari implikasi penelitian secara teoritis dan implikasi penelitian secara praktis yaitu diantaranya:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan manajemen dalam mengambil langkah maupun kebijakan untuk menyajikan laporan keuangan yang bebas dari kecurangan dan salah saji sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.
2. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan sektor pelayaran dapat menghindari konflik kepentingan dan juga menyeimbangkan kepentingan antara agen dan prinsipal yang ditandai dengan konflik kepentingan yang rendah sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada saham perusahaan, sehingga meningkatkan likuiditas perusahaan dan kondisi keuangan. kesusahan dapat dihindari. Sedangkan hasil Z-Score dapat digunakan sebagai gambaran perusahaan yang menjadi tujuan investasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan investasi oleh investor.
3. Perlunya pengawasan dari pemerintah yang adil serta mengevaluasi kekurangan dari peraturan pajak yang dibuat serta perlu adanya pengetahuan lebih dari masyarakat akan perusahaan yang berisiko atau tidak dan lebih teliti dalam melakukan investasi agar tidak menyebabkan kerugian.